



Hakcipta Dilindungi Undang-Undang

© Paksi Jilbab milik UIN Suska Riau

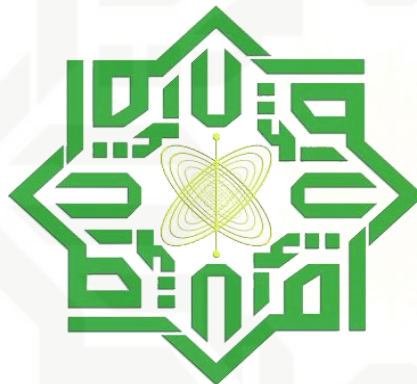
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP JAJANAN PANGAN  
DI LUAR GEDUNG OLEH DINAS KESEHATAN BERDASARKAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 942/MENKES/SK/VII/2003 TENTANG PEDOMAN  
PERSYARATAN HYGIENE SANITASI MAKANAN**

**JAJANAN DI KECAMATAN TEMBILAHAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

*Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



UIN SUSKA RIAU

**OLEH :**

**EKI SUDARNO**  
**NIM. 11720714807**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa merencanakan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Jajanan Pangan di Luar Gedung Oleh Dinas Kesehatan Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**, yang ditulis oleh:

Nama : EKI SUDARNO

NIM : 11720714807

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021

Pembimbing Skripsi

**Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, M.H**  
NIP. 19780227200801 1 009

UIN SUSKA RIAU



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP JAJANAN PANGAN, DI LUAR GEDUNG OLEH DINAS KESEHATAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 942/MENKES/SK/VII/2003 TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN HYGIENE SANITASI MAKANAN JAJANAN DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR"* yang ditulis oleh :

Nama : **Eki Sudarno**  
NIM : 11720714807  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 20 September 2021  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Oktober 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Asril, S.H.I., M.H.**

Sekretaris  
**Musrifah, S.H., M.H.**

Penguji I  
**Dr. ABU SAMAH, M.H**

Penguji II  
**Firdaus, SH., MH**

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan nama penulis.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : EKI SUDARNO

NIM : 117 2071 4807

Tempat/Tgl. Lahir : Tembilahan, 23 November 1999

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Pembinaan dan pengawasan terhadap yayasan-piyan di luar gedung oleh dinas kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/MENKES/ SK/VI/ 2003 tentang pedoman persyaratan Hygiene Sanitasi makanan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hulu

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 September 2021  
Yang membuat pernyataan



EKI SUDARNO

NIM : 117 2071 4807

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



## ABSTRAK

**Eki Sudarno, (2021) : Pembinaan dan Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir mengenai Hygiene Sanitasi terhadap pelaku usaha jajanan pangan Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri mengenai Hygiene Sanitasi terhadap pelaku usaha jajanan pangan, banyak nya pelaku usaha jajanan pangan yang tidak menerapkan pedoman hygiene sanitasi di Kecamatan Tembilahan, membuat pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan pada pasal 15 ayat (1) menyatakan “Pembinaan dan pengawasan makanan jajanan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota” dan ayat (2) menyatakan “untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pendataan terhadap sentra pedagang makanan jajanan dan sarana penjaja sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini”

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu melakukan penelitian di lapangan yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala seksi Kesehatan lingkungan dan Kesehatan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, beserta staff seksi Kesehatan lingkungan dan Kesehatan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sedangkan lokasi penelitian berada di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Dari penelitian ini diketahui bahwa Pembinaan dan Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir mengenai Hygiene Sanitasi terhadap pelaku usaha jajanan pangan Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dapat di lihat dari banyaknya pelaku usaha jajanan pangan tidak menerapkan pedoman hygiene sanitasi. Sedangkan faktor yang menghambat pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri mengenai Hygiene Sanitasi terhadap pelaku usaha jajanan pangan antara lain faktor komunikasi, faktor disposisi dan sumber daya manusia, faktor dana dan anggaran serta faktor kekosongan hukum.

**Kata kunci :** Pembinaan, Pengawasan, Dinas Kesehatan, Hygiene Sanitasi.



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karuniaNya akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, sesuai dengan waktu yang di jadwalkan. Shalawat beriring salam terucap kepada junjungan alam yakni Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu teknologi.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayah Sudarto, dan Ibu Enidawati, S.Pd.SD, serta kakak Ners. Lili Sudarni, S.Kep. yang telah memberikan motivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih Bapak dan Ibu atas do'a restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof Dr. Khairunnas M. Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Asril, S.H.I., M.H. dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Bapak Dr. Alpi Syahrin, S.H., M.H, C.P.L





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Azwar, S.E., M.Ec. selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberikan nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terkhususnya Prodi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dr. H. Afrizal Darmawan, MM selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir
9. Ibu Devi Natalia, SKM., M.H., selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.
10. Ibu Leni Rosita, AMK., selaku Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan bisa menambahkan khasanah ilmu pengetahuan. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 12 Juli 2021

**EKI SUDARNO**

**NIM: 11720714807**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>19</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir .....	19
B. Kecamatan Tembilahan .....	25
C. Kelurahan Tembilahan Kota.....	26
D. Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir .....	26
E. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir .....	27
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>36</b>
A. Teori Kebijakan Publik .....	36
B. Teori Pemerintahan Daerah.....	37
C. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	41
D. Pengertian Hygiene Sanitasi Makanan.....	42
E. Dasar Hukum Pembinaan dan Pengawasan Dinas Kesehatan tentang Hygiene Sanitasi makanan jajanan .....	43





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN..... 46**

- A. Pembinaan dan Pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir mengenai Hygiene Sanitasi terhadap pelaku usaha jajanan pangan Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ... 46
- B. Faktor penghambat Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembinaan dan pengawasan mengenai Hygiene Sanitasi terhadap pelaku usaha jajanan pangan Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir..... 61
- C. Upaya Hukum Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mencegah permasalahan dalam pembinaan dan pengawasan mengenai Hygiene Sanitasi terhadap pelaku usaha jajanan pangan Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.....64

## **BABV PENUTUP..... 68**

- A. Kesimpulan..... 68
- B. Saran ..... 71

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 .....</b>	<b>14</b>
<b>Tabel IV. 1.....</b>	<b>48</b>
<b>Tabel IV. 2.....</b>	<b>49</b>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakekatnya tidak lepas akan kebutuhan *premier* salah satunya ialah makanan sebagai sumber tenaga dalam menjalankan roda kehidupan, seiring berjalannya waktu makanan banyak berinovasi dari abad ke abad salah satunya makanan jajanan, Makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan/restoran, dan hotel.<sup>1</sup> Selain itu menurut *Food and agricultural organization* (FAO) makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang dipersiapkan dan dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan di tempat-tempat keramaian umum lain yang langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan atau persiapan lebih lanjut.<sup>2</sup> Istilah makanan jajanan tidak jauh dari istilah *junk food*, *fast food*, dan *street food* karena istilah tersebut merupakan bagian dari istilah makanan jajanan. Makanan jajanan terdiri dari minuman, makanan kecil (kudapan), dan makanan lengkap, didefinisikan sebagai makanan yang siap untuk dimakan atau terlebih dahulu dimasak di tempat penjualan, dan di jual di pinggir jalan, atau tempat umum.<sup>3</sup>

Makanan Jajanan kebanyakan memiliki tempat khusus atau kelompok dagang seperti pusat kuliner disuatu daerah yang mencerminkan budaya pada suatu

<sup>1</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan Pasal 1 Angka (1)

<sup>2</sup> Nurul Iklima, *Gambaran Pemilihan Makanan Jajanan Pada Anak Usia Sekolah Dasar*, (Bandung: Jurnal Keperawatan BSI, 2017) Vol. 5. No1. h. 10

<sup>3</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah tertentu. Makanan jajanan sangat digemari masyarakat dari kalangan anak kecil hingga orang tua, baik makanan tradisional maupun makanan hasil inovasi, kegemaran terhadap makanan tak lepas dari budaya Indonesia yang memiliki banyak makanan kuliner di setiap daerah. Tak lepas dari itu ide usaha jajanan pangan juga menjadi hal yang banyak digeluti oleh anak muda yang tak henti melakukan inovasi serta memodernisasi makanan tradisional sehingga menarik masyarakat untuk membelinya, di era serba digital ini beragam pelaku usaha jajanan pangan yang muncul saling bersaing dengan penjualan yang menarik terlihat dari kemasan yang dikemas begitu rapi dan modern, serta dalam teknik pemasarannya banyak melibatkan media sosial sehingga jangkauan informasi begitu luas untuk mempromosikan usaha mereka.

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya<sup>4</sup> hak untuk hidup merupakan hak yang telah ada secara lahir dan bathin di setiap manusia, salah satu menunjang hak untuk hidup itu ialah menjaga kesehatan kehidupannya sehari-hari, Kesehatan menjadi salah satu kewajiban negara dalam melaksanakan roda pemerintahannya, kesehatan mencerminkan bahwa suatu negara tersebut merupakan negara yang maju dan baik. Kesehatan lingkungan dilaksanakan terhadap tempat umum, lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, angkutan umum, dan lingkungan lainnya.<sup>5</sup> Kewajiban pemerintah dalam upaya menjadikan negara yang sehat merupakan cita-cita bangsa yang sudah diamanatkan dan tertuang dalam konstitusi kita, namun terdapat momok terbesar bagi pemerintah dalam upaya menjadikan negara

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28A

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 22 Ayat (2)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia negara yang sehat yaitu wabah, Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka<sup>6</sup> dan Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah.<sup>7</sup>

Untuk meminimalisir malapetaka (wabah) Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan keputusan sebagai mana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan di atasnya mengenai Pedoman Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan yang berjudul Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan, keputusan ini sebagai langkah awal dalam menanggulangi wabah yang kemungkinan terjadi disebabkan penularan virus atau penyakit melalui makanan, Hygiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan, satu langkah ini mesti dipertahankan oleh pelaku usaha baik mikro maupun makro bertujuan agar menghindari rantai penyebaran penyakit yang salah satu penyebab penularannya melalui makanan yang tidak sehat.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 1 Huruf (a)

<sup>7</sup> *Ibid.* Pasal 1 Huruf (b)

<sup>8</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan Pasal 1 Ayat (4).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman persyaratan Hygiene Sanitasi, konsideran Kepmenkes menyebutkan perlu ditetapkan pedoman persyaratan hygiene sanitasi makanan jajanan, hygiene sanitasi merupakan pedoman protokol kesehatan yang perlunya diterapkan disetiap penjamah makanan, baik dari segi mutu bahan baku, peralatan dan penyajian. Keputusan Menteri Kesehatan ini ditekankan adanya kewajiban pengelola sentra makanan untuk mendaftarkan, memelihara serta melaporkan hal yang berkaitan dengan Hygiene Sanitasi, selain dibebankan kepada pengelola sentra jajanan pangan,<sup>9</sup> penjamah makanan wajib memiliki pengetahuan tentang Hygiene Sanitasi makanan dan gizi serta menjaga kesehatan.<sup>10</sup> Pengkursusan dan pelatihan mengenai Hygiene Sanitasi kepada pelaku usaha atau penjamah makanan merupakan upaya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan yang tertuang pada bab ke VII.

Pembinaan dan pengawasan mengenai penerapan Hygiene Sanitasi dilakukan oleh dinas Kesehatan, sebagai mana telah tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Hygiene Sanitasi Jajanan Pangan pada pasal 15 ayat (1) menyatakan “Pembinaan dan pengawasan makanan jajanan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota” dan ayat (2) menyatakan “untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pendataan terhadap sentra pedagang makanan jajanan dan sarana penjaja sebagaimana tercantum dalam

<sup>9</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan Pasal 14.

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lampiran I keputusan ini”<sup>11</sup> Dinas kesehatan dalam salah satu perannya selain melakukan pendataan, pengawasan, melakukan pelatihan juga harus menyampaikan laporan secara berkala baik dalam segi pengawasan maupun pelatihan secara berkala atau berjenjang, serta dalam lampiran yang tertuang pada kepmenkes ini pendaftaran pelaku usaha dilakukan pada awal tahun kalender. Setelah dilakukannya pelatihan dan arti penting mengenai Hygiene Sanitasi para pelaku usaha mendapatkan sertifikat sebagai tanda telah melaksanakan pelatihan dan diberikan stiker untuk ditempel pada both atau tempat dilaksanakannya usaha guna sebagai penanda bahwa tempat pengelola/pelaku usaha sudah layak dalam menjajakan makanan mereka dan higienis.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau, memiliki jumlah penduduk 616.347 jiwa pada tahun 2017, dengan sebaran 49 jiwa/km<sup>2</sup> dan memiliki 20 kecamatan, 39 kelurahan serta 197 desa.<sup>12</sup> Dengan ibukota tembilahan, dengan keberagaman suku dan budaya yang ada disana menjadikan ibu kota tembilahan sebagai kota yang majemuk, terdiri dari beberapa suku yang dominan seperti banjar, melayu, bugis, jawa dan madura, tak hanya itu, sebagian masyarakatnya ialah pelaku usaha jajanan pangan yang membuatnya banyak beragam jajanan pangan tradisional hingga jajanan pangan yang berinovasi. Salah satu jalan yang ramai aktivitas dan mobalitas penduduk ialah jalan M. Boya yang terletak ditengah kota dan salah satu akses terdekat dari pelabuhan, banyaknya penginapan, serta lampu yang terang dimalam hari, tak hanya itu jalan M. Boya salah satu jalan yang ramai akan jajanan makanan di luar

<sup>11</sup> *Ibid.* Pasal 15.

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, *Kecamatan Tembilahan Dalam Angka 2020* (Tembilahan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir) h. 1-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gedung, dan ramai dikunjungi oleh masyarakat baik jajanan tradisional maupun jajanan inovasi, persaingan usaha disana begitu ketat saling menarik perhatian pengunjung, namun dalam permasalahan yang teliti amati disetiap jajanan makanan di tembilahan, penulis belum melihat adanya stikerisasi<sup>13</sup> pada setiap tempat jajanan makanan yang di jajakan sebagai tanda telah terdaftar atau mengikuti program hygiene sanitasi hal ini sebagai salah satu fenomena awal sejauh mana peran Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pedoman Hygiene Sanitasi pada pelaku usaha jajanan pangan, selain itu terdapat fenomena lain seperti<sup>14</sup> limbah hasil penggorengan masih dibuang di aliran got, kurangnya kebersihan, dan kurangnya kesadaran mengenai bahaya lalat yang berterbangan ditempat jajahan makanan mereka.

Dilihat dari fenomena diatas Penulis dapat menyimpulkan bahwasannya Pembinaan dan Pengawasan Dinas Kesehatan mengenai pedoman hygiene sanitasi belum berjalan dengan baik dibuktikan dengan masih banyaknya pelaku usaha tidak mendapatkan pembinaan dan pengawasan, dan fenomena lain seperti limbah hasil penggorengan masih dibuang di aliran got, kurangnya kebersihan, dan kurangnya kesadaran mengenai bahaya lalat yang berterbangan ditempat jajahan makanan mereka, masih belum tergambarkan pola perilaku pelaku usaha menerapkan pedoman Hygiene Sanitasi dilihat dari tingkat kesadaran yang rendah mengenai kebersihan cara penyajian yang sering kali melakukan kontak fisik terhadap makanan saat atau sedang di jajahkan.

<sup>13</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan Pasal 15 Ayat (3).

<sup>14</sup> *Ibid*, Lampiran 1. H.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dari fenomena yang telah penulis paparkan diatas perlu adanya adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kendala atau hambatan mengenai penerapan Hygiene Sanitasi oleh Dinas Kesehatan kepada pelaku usaha jajanan pangan di luar gedung dan penelitian lebih lanjut ini bisa memberikan solusi atau terobosan agar terciptanya perbaikan kondisi, pola prilaku yang sesuai dengan Pedoman Hygiene Sanitasi, oleh karna itu penulis tertaring mengangkat judul mengenai **“PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP JAJANAN PANGAN DI LUAR GEDUNG OLEH DINAS KESEHATAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 942/MENKES/SK/VII/2003 TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN HYGIENE SANITASI MAKANAN JAJANAN DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**

**B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dan untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini di fokuskan kepada:

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar Jajanan Pangan di Luar gedung.
2. Informasi yang disajikan yaitu: bentuk pembinaan berupa pendataan, pendaftaran, penyuluhan dan kursus serta pembentukan sentra pedagang makanan jajanan sedangkan bentuk pengawasan oleh Dinas Kesehatan terhadap Jajanan Pangan diluar gedung antara lain pengawasan dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Inspeksi Sanitasi secara berkala dan penerapan HACCP secara berkala, membuat laporan pengawasan.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Pembinaan dan Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir mengenai Hygiene Sanitasi terhadap pelaku usaha jajanan pangan?
2. Apa Faktor penghambat Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembinaan dan pengawasan mengenai Hygiene Sanitasi terhadap pelaku usaha jajanan pangan?
3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mencegah permasalahan dalam pembinaan dan pengawasan mengenai Hygiene Sanitasi terhadap pelaku usaha jajanan pangan?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Pembinaan dan Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir mengenai Hygiene Sanitasi terhadap pelaku usaha jajanan pangan.
- b. Untuk mengetahui Faktor penghambat Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pembinaan dan Pengawasan mengenai Hygiene Sanitasi terhadap pelaku usaha jajanan pangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mencegah permasalahan dalam pembinaan dan pengawasan mengenai Hygiene Sanitasi terhadap pelaku usaha jajanan pangan.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

### a. Secara Teoritis

- 1) Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai Pengawasan terhadap Jajanan Pangan di luar gedung oleh Dinas Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan Pangan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
- 2) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

### b. Saran Praktis

Dapat memberikan data serta informasi mengenai Pengawasan terhadap Jajanan Pangan di luar gedung oleh Dinas Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sanitasi Makanan Jajanan Pangan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

c. Secara Akademis

Kegunaan akademis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

## E. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani: *methodos* yang berarti cara atau jalan. Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan.<sup>15</sup> Penelitian adalah terjemahan dari Bahasa Inggris *research* yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis, serta sempurna terhadap permasalahan. Sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problem.<sup>16</sup> Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Istilah penelitian hukum empiris berasal dari bahas Inggris, yakni *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda

<sup>15</sup> Joko Subagyo, *Metode penelitian dalam teori dan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, jilid 1, 2011), h.1.

<sup>16</sup> Ibid, h. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut dengan istilah *empirisch juridisch ondrezoek*, sedangkan dalam bahasa Jermannya disebut dengan *empirische juristische recherche*<sup>17</sup>. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. menurut Abdul Kadir Muhammad adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat<sup>18</sup>. Penelitian hukum empiris beranjak dari adanya kesenjangan antara *das Sollen and das Sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita. Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

## 2. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang di temukan, penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir dan Kecamatan Tembilahan, dimana Kecamatan Tembilahan tersebut merupakan salah satu Kecamatan yang ramai akan penduduk dan terdapat fenomena yang terlihat oleh penulis belum diterapkannya dengan efektif pedoman Hygiene Sanitasi terhadap pelaku usaha Jajanan Pangan diluar gedung seperti pembuangan

<sup>17</sup> H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 20

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 14

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

limbah hasil penjualan mereka ke got, masih belum adanya kesadaran akan bahayanya serangga lalat dan sejenisnya dan dalam menjalankan usahanya terdapat kontak langsung penjamuan makanan tanpa menggunakan sarung tangan dan peralatan yang telah dituang dalam peraturan menteri kesehatan.

Selain itu lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai Pengawasan terhadap Jajanan Pangan di luar gedung oleh Dinas Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan Pangan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

### 3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian,<sup>19</sup> Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.<sup>20</sup> Dalam penelitian hukum ini penulis tidak memerlukan angket dikarenakan Populasi dan sampel adalah orang yang benar-benar mengetahui peristiwa permasalahan tersebut. Dalam sumber data ini penulis hanya melakukan wawancara kepada orang yang benar-benar mengetahui peristiwa tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir yang mana paling utama adalah Kepala Dinas Kesehatan

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h.118.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 1 orang. Kepala seksi Kesehatan lingkungan dan Kesehatan kerja Dinas Kesehatan Indragiri Hilir sebanyak 1 orang. Staff seksi Kesling dan Kesja Dinas Kesehatan Indragiri Hilir sebanyak 7 orang. Dan pelaku usaha atau TPM (tempat pengolahan makan) dikecamatan tembilahan dengan kategori laik hygiene sanitasi pangan sebanyak 50 orang

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *Total Sampling* dikhususkan kepada Instansi Dinas Kesehatan kabupaten Indragiri Hilir. *Total Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi.<sup>21</sup> Sampel dalam penelitian ini sama dengan jumlah populasi yang akan diteliti berjumlah 9 orang. Sedangkan teknik penarikan sampel pada pelaku usaha dikecamatan tembilahan dengan kategori laik hygiene sanitasi pangan adalah *Random Sampling*, *Random Sampling* adalah suatu cara pengambilan sampel secara random atau tanpa pandang bulu. Dalam random sampling ini semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil menjadi anggota sampel.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Joko Subagyo, *Op Cit*, h. 87

<sup>22</sup> H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan, *Loc Cit*, h. 108

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Populasi Dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase %
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Kepala seksi Kesling dan Kesja Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir	1 Orang	1 orang	100%
3.	Staff seksi Kesling dan Kesja Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir	7 Orang	7 Orang	100%
<b>Total Keseluruhan</b>		9 Orang	9 Orang	100%

Sumber : *Data lapangan*, 2020.

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sample	Persentase %
1.	Pelaku usaha Laik Hygiene Sanitasi Pangan	50 orang	5 orang	10%
<b>Total Keseluruhan</b>		5 Orang		

Sumber : *Data lapangan*, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Wawancara yang dipilih adalah wawancara bebas terpimpin, yang dilakukan dengan responden *total sampling* dan *Random Sampling* yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala seksi Kesling dan Kesja Dinas Kesehatan Indragiri Hilir dan Staff seksi Kesling dan Kesja Dinas Kesehatan Indragiri Hilir sebanyak 7 orang dan pelaku usaha laik hygiene sanitasi pangan sebanyak 5 orang. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepastakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Data sekunder dari bahan hukum primer sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945.
  - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
  - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
  - e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan.
2. Bahan Hukum Sekunder, data dimaksud berwujud:
  - a. Buku-buku teks dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
  - b. Dokumen atau arsip resmi atau arsip yang berkaitan.
3. Bahan Hukum tersier berupa kamus atau buku hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya. peneliti melakukan observasi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Jajanan Pangan di Luar Gedung oleh Dinas Kesehatan Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden. Untuk memperoleh data primer, wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap komponen yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir yang bergerak dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap jajanan pangan di luar gedung tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan yaitu untuk memberikan informasi yang diperlukan penulis dalam penulisan skripsi ini.
- c. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti. Diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan mengenai Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Jajanan Pangan di Luar Gedung oleh Dinas Kesehatan Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dan data yang terkumpul dalam penelitian berupa analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid. h. 69.*





## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di sebelah Timur Provinsi Riau atau pada bagian Timur pesisir Pulau Sumatera. Secara resmi terbentuk pada tanggal 14 Juli 1965 sesuai dengan tanggal ditanda-tanganinya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965. Karena letak posisi Kabupaten Indragiri Hilir di pantai Timur pesisir Pulau Sumatera, maka Kabupaten ini dapat dikategorikan sebagai daerah pantai. Panjang garis pantai Kabupaten Indragiri Hilir adalah 339.5 Km dan luas perairan laut meliputi 6.318 Km<sup>2</sup> atau sekitar 54.43% dari luas wilayah. Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan bagian wilayah Provinsi Riau, memiliki luas wilayah 1.367.551 Ha, dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 25 pulau. Secara geografis terletak pada posisi 0036'LU —10 07' LS dan 1040 10' — 1020 32' BT.<sup>24</sup> Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi)
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu; dan
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Lingga (Provinsi Kepulauan Riau).

<sup>24</sup> Kabupaten Indragiri Hilir, 2015-2021, *Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)*, h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan letak dan posisinya yang strategis, keberadaan Kabupaten Indragiri Hilir di Pantai Timur Sumatera memiliki prospek yang cukup tinggi bagi pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, karena posisinya yang berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan seperti Batam dan Karimun, serta berada di wilayah perairan yang mampu mengakses berbagai wilayah dalam maupun luar negeri. Hal ini merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai “Pintu gerbang Timur Sumatera” dalam berbagai aktifitas pembangunan.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah pantai dan rawa pasang surut dengan penyebaran sungai hampir di seluruh kecamatan. Disamping sungai, selat dan terusan juga terdapat parit-parit untuk mengendalikan arus air pada saat pasang surut, kondisi ini menggambarkan karakteristik wilayah ini yang juga lebih dikenal dengan sebutan “Negeri Seribu Parit”. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 20 kecamatan antara lain Keritang, Reteh, Enok, Tanah Merah, Kuala Indragiri, Tembilahan, Tempuling, Batang Tuaka, Gaung Anak Serka, Gaung, Mandah, Kateman, Kemuning, Tembilahan Hulu, Pulau Burung, Pelangiran, Teluk Balengkong, Concong, Kempas dan Sungai Batang.

Secara fisiografinya, wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa kemiringan lereng wilayah Kabupaten Indragiri Hilir didominasi oleh kemiringan 0 – 2%, seluas 1.298.763 Ha (94.97%), kemiringan 3 - 5% seluas 9.710 Ha (0.71%), kemiringan 16 - 40% seluas 21.197 Ha (1.55%) dan kemiringan di atas 40% seluas 37.744 Ha (2.76%).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan khusus kondisi topografi untuk Kawasan Kuala Enok didominasi oleh lahan dengan kemiringan 0 – 8 %

Berdasarkan data statistik yang ada, diketahui jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2012 adalah sebanyak 689.938 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut terdiri dari 170.762 Kepala Keluarga (Rumah Tangga). Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir tergolong amat rendah, yaitu 84,80 jiwa per Km<sup>2</sup> dan rata-rata anggota keluarga sebanyak 4 jiwa.<sup>25</sup>

Pada umumnya distribusi penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir cukup merata untuk setiap wilayah kecamatan. Distribusi penduduk yang paling tinggi berada di Kecamatan Gaung Anak Serak, dengan distribusi penduduk sekitar 10,50 5 atau 71.193 jiwa. Selain itu, untuk memudahkan pergerakan, maka penduduk juga memilih untuk membangun rumah yang berada di sekitar tepi jalan dan tepi sungai/parit.

1. Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir<sup>26</sup>.

Visi Kabupaten Indragiri Hilir yaitu, Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dan amanat pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah menjadikan: **“INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG TAHUN 2025”**

Keberhasilan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengembangkan wilayahnya yang memiliki kekhasan sebagai wilayah pasang surut dan

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 32

<sup>26</sup> <http://pupr.inhilkab.go.id/halaman/detail/visi-dan-misi-kabupaten-indragiri-hilir>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bergambut, menjadi sebuah wilayah yang telah berkembang, maju, dan terbuka adalah merupakan bukti bahwa di wilayah lahan marginal telah dapat diwujudkan suatu kehidupan yang menjadikan bagi masa depan daerah dan masyarakat yang setara dengan daerah-daerah lainnya yang sifat lahan wilayahnya jauh lebih berpotensi.

Tingkat kemajuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Indragiri Hilir, dapat diukur dengan menggunakan ukuran-ukuran yang lazim digunakan dalam melihat tingkat kemakmuran yang tercermin dari pada tingkat pendapatan dan distribusinya dalam masyarakat. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat dan semakin meratanya distribusinya pendapatan tersebut dalam masyarakat, maka akan semakin maju tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Demikian pula dari sisi mutu sumberdaya manusianya dengan menggunakan indikator sosia budaya yang dapat dilihat dari tingkat penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang tercermin melalui tingkat pendidikan masyarakat terendah, dan budaya masyarakat, sedangkan untuk derajat kesehatan masyarakat dilihat dari angka harapan hidup yang semakin panjang.

Disamping indikator-indikator ekonomi dan sosial budaya tersebut, juga indikator politik, hukum, keamanan dan ketertiban adalah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dapat dijadikan indikator dalam mengukur kemajuan daerah. Suatu kemajuan yang hebat (GEMILANG) akan dapat dicapai melalui pengelolaan yang lebih baik terhadap sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan yang bersinergi, sistematis dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konseptual antara kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur perekonomian daerah, penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan politik yang semakin berkualitas dan berkembangnya tatanan sosial dan budaya masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, maka akan ditempuh melalui misi sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Mewujudkan daya saing daerah: adalah memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam secara efisien dan efektif dengan tetap memegang prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainable*) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan tetap memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata.
- b. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang demokratis: adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintah yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila dan konsitusi negara dalam koridor NKRI, semakin mantapnya kelembagaan politik, masyarakat dan kebudayaan, semakin dinamisnya komunikasi dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan publik yang lebih luas, serta semakin berkembangnya dengan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mantap dan mapannya suasana kehidupan yang menjunjung hukum dan perwujudan penegakan hukum yang adil, konsisten, serta tidak diskriminatif.

- c. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya: adalah agar seluruh wilayah Kabupaten Indragiri hilir dan seluruh kelompok masyarakat dapat berkembang, maju dan sejahtera secara bersama-sama tanpa ada yang tertinggal ataupun ditinggalkan, keberpihakan pembangunan kepada kelompok rentan harus menjadi prioritas, berkembangnya aksesibilitas di seluruh wilayah, dan menjangkau ke seluruh wilayah dan kelompok masyarakat, serta hilangnya diskriminasi termasuk gender.
- d. Mewujudkan suasana aman, damai, dan harmonis yang bermoral beretika dan berbudaya: adalah dengan menciptakan keadaan kondusif yang pada berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial budaya dan politik sebagai daerah yang pada awalnya memiliki tingkat heterogenitas namun telah melebur dalam satu nilai kultural yang dijunjung secara bersama yakni melayu maka harmonisasi dalam kehidupan masyarakat yang telah terwujud harus dapat dipertahankan terus dan dikembangkan agar mampu menjadi filter yang handal untuk menangkal masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan mengakomodir nilai-nilai yang mampu membawa perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dan lebih sejahtera.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mewujudkan daerah yang memiliki peran penting pada tingkat regional, nasional dan internasional: adalah merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kenegaraan dan sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada tataran regional nasional dan internasional sehingga perlu semakin dimantapkan infentitas dan integrasi yang dapat menjadikan kebanggaan tersendiri sebagai masyarakat indragiri hilir, mendorong meningkatkan dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar daerah pada skala regional, nasional dan internasional.

## B. Kecamatan Tembilahan

Kecamatan Tembilahan merupakan salah satu wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, terdiri atas 55 RW dan 265 RT<sup>28</sup>, luas wilayah Kecamatan Tembilahan adalah 197,37 km<sup>2</sup> dengan luas masing-masing sebagai berikut:

1. Kelurahan Seberang Tembilahan : 81,06 Km<sup>2</sup>
2. Kelurahan Sungai Perak : 58,07 Km<sup>2</sup>
3. Kelurahan Tembilahan Hilir : 14,57 Km<sup>2</sup>
4. Kelurahan Tembilahan Kota : 3,34 Km<sup>2</sup>
5. Kelurahan Pekan Arba : 19,11 Km<sup>2</sup>
6. Kelurahan Sungai Beringin : 20,72 Km<sup>2</sup>

Batas-batas wilayah Kecamatan Tembilahan adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka.

<sup>28</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, *Kecamatan Tembilahan Dalam Angka 2020* (Tembilahan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir) hlm. 11

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Enok.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tembilahan Hulu.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuala Indragiri dan Tanah Merah.

Jumlah penduduk di Kecamatan tembilahan saat ini berkisar 75.864 jiwa, dan jumlah orang yang berkeluarga berkisar 22.828 keluarga pada tahun 2019.<sup>29</sup>

### C. Kelurahan Tembilahan Kota

Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota melalui Camat.<sup>30</sup> Kelurahan Tembilahan Kota adalah salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Tembilahan. Luas wilayah kelurahan Tembilahan Kota 3,34 Km2. Jumlah Rukun Warga (RW) yang ada di Kelurahan Tembilahan Kota adalah 16 RW dan Jumlah Rukun Tetangga (RT) adalah 76 RT.

### D. Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir

Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah, salah satunya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 17

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah no 73 tahun 2005 tentang Kelurahan Pasal 3 Ayat (1) dan (2)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah **“MASYARAKAT SEHAT, DESA MAJU, INHIL GEMILANG”** dan

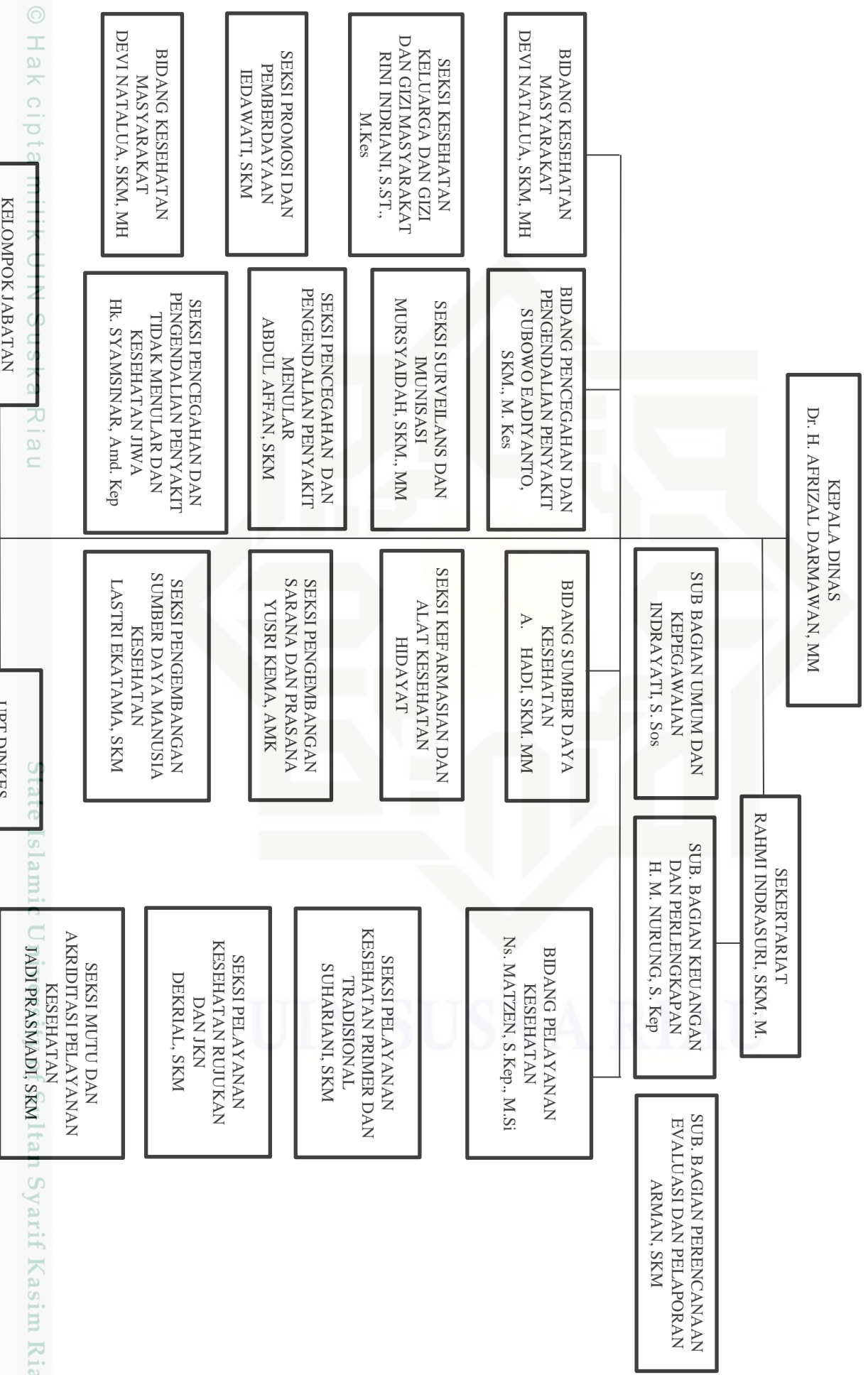
Misi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah:<sup>31</sup>

- a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
- b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif.
- c. Meningkatkan status gizi masyarakat.
- d. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
- e. Mengupayakan ketersediaan sumber daya kesehatan (SDK) yang merata
- f. Meningkatkan peran desa siaga aktif melalui kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha.
- g. Melaksanakan penanggulangan masalah kesehatan dan penyehatan lingkungan.
- h. Melaksanakan pengawasan dan pengaturan dibidang kesehatan.
- i. Menyelenggarakan manajemen dan informasi kesehatan.

**E. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.**<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Data Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2 Maret 2020.

<sup>32</sup> Data Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2 Maret 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.

Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hilir yang mana diberikan tugas dibidang kesehatan, fungsi dan wewenang dalam menjalankan peraturan daerah, perintah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kabupaten Indragiri Hilir. Dasar hukum Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir Pasal 26 yang berbunyi:<sup>33</sup>

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur-unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur oleh Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir

<sup>33</sup> Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir. Pasal 26

<sup>34</sup> *Ibid.* pasal 28-49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahanb di bidang kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas memiliki fungsi:

- 1) Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan pada setiap bidang-bidang Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.
  - 2) Pemberian dukungan atas pelaksanaan urusan pemerintahan pada setiap bidang-bidang Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.
  - 3) Penyelenggaraan kebijakan teknis urusan pemerintahan pada setiap bidang-bidang Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.
  - 4) Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksana urusan pemerintahan pada bidang-bidang terkait Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.
  - 5) Penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan dengan bidang tugas dan fungsinya.
- b. Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir
- Sekertaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang kesekretariatan lingkup penyelenggaraan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas sekertaris mempunyai fungsi:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesehatan.
- 2) Pemberian dukungan, pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, keperotokolan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama, dan kehumasan
- 3) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
- 4) Penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan, dan anggaran kesekretariatan.
- 5) Koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
- 6) Koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian aparatur.
- 7) Koordinasi penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas.
- 8) Penyelenggaraan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.
- 9) Koordinasi penyusunan pelaporan kinerja dinas yang meliputi Laporan Kinerja Dinas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), LKPI, LLPD, Laporan pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas.
- 10) Mengevaluasi tindak lanjut rapat-rapat Intern

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11) Koordinasi penyusunan tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan (LPH).

12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan;
- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kesehatan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup urusan umum dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kesehatan; dan
  - 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- e. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup urusan keuangan dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :
- 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
  - 2) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Keuangan dan Perlengkapan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kesehatan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

f. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dibidang kesehatan masyarakat lingkup Kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada dibidang kesehatan masyarakat lingkup Kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.;
- 2) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di dibidang kesehatan masyarakat lingkup Kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kesehatan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.





### BAB III

#### KAJIAN PUSTAKA

##### A. Teori Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik diungkap oleh A. Hoogerwert adalah unsur penting dari politik, dapat diartikan juga sebagai mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu. Dan juga menurut Anderson Kebijakan publik adalah hubungan antar unit-unit pemerintah dengan lingkungannya.<sup>35</sup> Selanjutnya Gerston menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada setiap tingkatan pemerintahan untuk memecahkan masalah publik. Lebih lanjut menjelaskan bahwa proses penentuan suatu kebijakan mencakup lima tahapan, yaitu (1) mengidentifikasi isu-isu kebijakan publik, (2) mengembangkan proposal kebijakan publik, (3) melakukan advokasi kebijakan publik, (4) melaksanakan kebijakan publik, (5) mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan.

Dan pada dasarnya kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam memecahkan suatu permasalahan publik. Terdapat beberapa proses yang harus dilakukan dalam pembuatan kebijakan publik. Dan dapat disimpulkan juga bahwa kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang memiliki maksud dan tujuan.

Menurut Dunn fungsi dari evaluasi kebijakan yaitu, evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan, atau dalam bahasa lain, fungsi kebijakan untuk menyediakan data dan informasi

<sup>35</sup> Bambang Margono dkk, *Pembaharuan Perlindungan Hukum*, (Jakarta: Inti Ilmu, 2003), h.6

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memutuskan apakah mereka melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan sebuah pelaksanaan kebijakan<sup>36</sup>

## B. Teori Pemerintahan Daerah

Pemerintah merupakan sebuah alat dari penyelenggaraan pemerintahan, dan merupakan subsistem dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu maka tugas-tugas Negara/pemerintah merupakan tugas-tugas apapun urusan-urusan pemerintah diserahkan kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta kepentingan nasional. Pemerintah daerah adalah aparat yang menjalankan pemerintahan yang mempunyai batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri<sup>37</sup>

Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 2). Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>38</sup>

Pasal 18 UUD 1945 merupakan landasan dasar bagi penyelenggara pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/ 1998, bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan

<sup>36</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 191-192

<sup>37</sup> Pasal 1 angka (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>38</sup> Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 325



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pusat dan daerah. Tujuan pemberian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan demokrasi, keadilan dan pemerataan.<sup>39</sup>

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, serta menyejahterakan masyarakat.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu Pemerintahan Daerah juga memiliki arti pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>40</sup>

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

<sup>39</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

<sup>40</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan atau pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

a. Asas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya mendasari peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari; asas dekosentrasi, asas desentralisasi dan asa tugas pembantuan.

b. Asas Dekosentrasi

Dekosentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa asas dekosentrasi merupakan pelimpahan kewenangan terhadap sebagian urusan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pemerintah pusat, dari pemerintah pusat kepada pejabat dan perangkat pemerintah pusat di daerah.

c. Asas Desentralisasi

Menurut Koesomahatmaja dalam Koswara adalah peilmpahan kekuasaan pemerintahan pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom). Desentralisasi adalah merupakan system untuk mewujudkan asas demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan kekuasaan negara.

d. Asas Tugas Pembantuan

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.<sup>41</sup>

Asas-asas umum pemerintahan yang baik dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum (recht bescherming) dan bahkan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum (verhoogdrecht bescherming) bagi warga negara dari tindakan pemerintah. Selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan.

<sup>41</sup> Ani Sri Rahayu. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017, h. 157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut SF. Marbun, asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki arti penting dan fungsi berikut :

- a) Bagi administrasinegara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat samara tau tidak jelas.
- b) Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat digunakan sebagai dasar gugatan.
- c) Bagi hakim Tata Usaha Negara, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat Tata Usaha Negara.
- d) Selain itu, asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang.

Dengan adanya kewenangan bagi administrasi negara bertindak untuk bertindak secara bebas dalam melaksanakan tugas-tugasnya maka ada kemungkinan bahwa administrasi negara akan melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

### C. Pengertian Hygiene Sanitasi

Higiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan individu, sedangkan Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan. Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi terhadap



makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi.<sup>42</sup>

#### **D. Pengertian Hygiene Sanitasi Makanan**

Hygiene Sanitasi Makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.<sup>43</sup> didalam Hygiene sanitasi makanan ada istilah BTP dan BTM, BTP atau bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.<sup>44</sup>

BTM atau bahan tambahan makanan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan ingredien khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi (termasuk organoleptik) pada pembuatan, pengolahan, penyediaan, perlakuan, pewadahan, bungkus, penyimpanan atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan (langsung atau tidak langsung) suatu komponen yang mempengaruhi sifat khas makanan.<sup>45</sup>

<sup>42</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga

<sup>43</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2003 Tentang Pangan

<sup>44</sup> Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pewarna

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/Per/IX/88 Tentang Bahan Tambahan Makanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada penerapannya pelaku usaha yang menjajakan makanannya harus menerapkan dan mengetahui mengenai syarat hygiene sanitasi dan prinsip-prinsipnya, Prinsip hygiene dan sanitasi makanan ini penting untuk dipatuhi dalam pelaksanaannya karena berperan sangat besar sebagai faktor kunci keberhasilan usaha penyehatan makanan bagi masyarakat dan lingkungannya. Dasar Hukum kewajiban menerapkan pedoman Hygiene Sanitasi pada pelaku usaha jajanan makanan yaitu KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 942/MENKES/SK/VII2003 TENTANG PEDOMAN HYGIENE SANITASI MAKANAN JAJANAN pasal 16 yang berbunyi:

1. Penjamah makanan berkewajiban memiliki pengetahuan tentang hygiene sanitasi makanan dan gizi serta menjaga kesehatan.
2. Pengetahuan mengenai hygiene sanitasi makanan dan gizi serta menjaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui kursus hygiene sanitasi makanan.
3. Pedoman penyelenggaraan kursus hygiene sanitasi makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

**E. Dasar Hukum Pembinaan dan Pengawasan Dinas Kesehatan tentang Hygiene Sanitasi makanan jajanan**

**1. Pengertian Pembinaan**

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri<sup>46</sup>

#### 2. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.<sup>47</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P Siagian yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>48</sup> Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak, Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam

<sup>46</sup> Simanjuntak, B., I. L. Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, (Bandung: Tarsito, 1990), h. 84.

<sup>47</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara* (Buku Ajar). (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2000), h.81

<sup>48</sup> Siagian, Sondang. P. *Administrasi Pembangunan*. (Jakarta: Gunung Agung: Jakarta, 2000), h.135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang dibedakan kepada aparat pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggungjawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan<sup>49</sup>

### 3. Dasar Hukum Pembinaan dan Pengawasan

Dalam upaya terciptanya kesehatan di Masyarakat dan terhindarnya wabah atau KLB (Kejadian luar biasa) dasar hukum upaya melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan, pada Bab VII mengenai pembinaan dan pengawasan, pada pasal 15 ayat (1) menyatakan “Pembinaan dan pengawasan makanan jajanan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota” dan ayat (2) menyatakan “untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pendataan terhadap sentra pedagang makanan jajanan dan sarana penjaja sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini”

---

<sup>49</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah* (Buku Ajaran), (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), h. 82



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada BAB IV diatas yang menjadi pokok masalah dalam penulisan ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap jajanan pangan diluar gedung berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 di Kecamatan Tembilahan dalam kenyataannya belum berjalan secara maksimal, hal ini disebabkan dikarnakan keterbatasan pembiayaan untuk melakukan pengadaan pembinaan, kondisi sekarang kesadaran masyarakat akan layak uji kehygienisan sanitasi masih kurang mereka lebih mementingkan surat izin usaha dikarnakan sertifikat hygiene sanitasi belum ada kekuatan hukum, Petugas Inspeksi sanitasi atau sanitarian yang ada pada puskesmas dalam kinerjanya masih kurang akan kesadaran, serta faktor kurangnya SDM (sumber daya manusia) yang sesuai dalam bidangnya dan ada juga yang memang kurang berkontribusi akan hal pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi, dalam bentuk pembinaan yang terlaksana kurang baik maka berimbas pada pengawasan yang kurang baik juga.
2. Adapun kendala-kendala yang menghambat Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap jajanan pangan diluar gedung berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 di Kecamatan Tembilahan sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Faktor Komunikasi
  - b. Faktor Disposisi dan Sumber daya
  - c. Faktor Dana dan Anggaran
  - d. Faktor Kekosongan Hukum
3. Dalam Upaya Hukum yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mencegah permasalahan dalam pembinaan dan pengawasan mengenai Hygiene Sanitasi terhadap pelaku usaha jajanan pangan antara lain:
- a. Pengupayaan pada faktor komunikasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir melakukan evaluasi terhadap kinerja petugas sanitarian yang turun kelapangan untuk meningkatkan komunikasi sehingga informasi, materi dan kewajiban pelaku usaha tersampaikan secara baik, serta memberikan ketegasan kepada petugas sanitarian agar meningkatkan kualitas kerja dalam upaya kesehatan lingkungan.
  - b. Pengupayaan pada faktor Disposisi dan Sumber daya Manusia, Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir akan meningkatkan Sumber daya manusia dan juga telah melakukan evaluasi pada penempatan tenaga sanitarian yang harus sesuai pada bidang dan latar belakang pendidikannya.
  - c. Dalam pengupayaan pada Faktor Anggaran Dana dan Kekosongan Hukum, Dinas Kesehatan telah berdiskusi dengan Pemerintah Daerah yaitu pengajuan ketetapan terhadap Pemerintahan Daerah mengenai tata cara atau teknis pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan dilapangan dan pemberian sanksi administratif serta Ketetapan

anggaran pembiayaan pembinaan mengenai hygiene sanitasi oleh Dinas Kesehatan, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut oleh pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir

## **B. Saran**

Agar Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap jajanan pangan diluar gedung berjalan lebih baik lagi, penulis memiliki saran:

1. Diharapkan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir secepatnya meminta Permohonan lebih lanjut yang konteksnya urgensi kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir agar mengupayakan adanya Keputusan lebih lanjut tentang Hygiene Sanitasi Jajanan Makanan (Baik berupa tata cara atau teknis dan pengadaan anggaran).
2. Diharapkan Dinas Kesehatan berupaya meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia sesuai dengan keahlian dan bidang mengenai petugas sanitarian.
3. Diharapkan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha jajanan pangan agar meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan baik dari segi hygiene maupun sanitasi walaupun hingga saat ini belum ada kekuatan hukum yang mengikat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur

- Subagyo Joko. 2011. *Metode penelitian dalam teori dan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunggono Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto Soerjono, dkk. 2020 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Margono, Bambang dkk. 2003. *Pembaharuan Perlindungan Hukum* Jakarta: Inti Ilmu
- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*. Bandung: Alfabeta
- Huda, Ni'Matul. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Tiena Masriani, Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*. 2004. Jakarta: Sinar Grafika
- Sri Rahayu, Ani. 2017. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Simanjuntak, B., I. L Pasaribu. 1990. *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*. Bandung: Tarsito

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurmayani. 2000. *Hukum Administrasi Negara*. Bandar Lampung: Univerrstas Lampung

Siagian, Sondang. 2000P. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung: Jakarta

Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung

Djoko Windu P. Irawan. 2016. *Prinsip-prinsip Hygiene Sanitasi Makanan dan Minuman di Rumah Sakit*. Ponorogo: Forikes

Yahya, Yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu

**B. Jurnal**

Rahmayani. 2018. *Hubungan Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Hygiene Sanitasi Pedagang Jajanan Makanan di Pinggir Jalan*. Banda Aceh: Jurnal AcTion, Vol. 3 No. 2.

Iklima Nurul. 2017. *Gambaran Pemilihan Makanan Jajanan Pada Anak Usia Sekolah Dasar*. Bandung: Jurnal Keperawatan BSI. Vol. 5. No1.

**C. Web**

<http://pupr.inhilkab.go.id/halaman/detail/visi-dan-misi-kabupaten-indragiri-hilir>

<https://tpm.kemkes.go.id/kesling-web>

**D. Undang-Undang dan Sejenisnya**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2003 Tentang Pangan

Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pewarna

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/Per/IX/88 Tentang Bahan Tambahan Makanan

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. *Kecamatan Tembilahan Dalam Angka 2020*. Tembilahan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

Kabupaten Indragiri Hilir, 2015-2021, *Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)*.

Data Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *“PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP JAJANAN PANGAN DI LUAR GEDUNG OLEH DINAS KESEHATAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 942/MENKES/SK/VII/2003 TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN HYGIENE SANITASI MAKANAN JAJANAN DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”* yang ditulis oleh :

Nama : **Eki Sudarno**  
NIM : 11720714807  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 20 September 2021  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Oktober 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Asril, S.H.I., M.H.**

Sekretaris  
**Musrifah, S.H., M.H.**

Penguji I  
**Dr. ABU SAMAH, M.H**

Penguji II  
**Firdaus, SH., MH**

.....  
.....  
.....  
.....

Mengetahui:  
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag.**  
NIP. 19750801 200701 1 023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4479/2021  
Sifat : Biasa  
Temp. : I (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 17 Juni 2021

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : EKI SUDARNO  
NIM : 11720714807  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Dinas Kesehatan Kota Tembilahan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Jajanan Pangan di Luar Gedung oleh Dinas Kesehatan Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/Sk/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

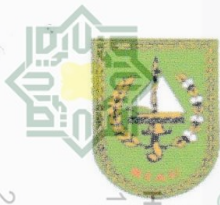
Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diilindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/41918  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/4479/2021 Tanggal 17 Juni 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

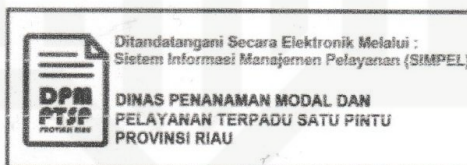
- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : EKI SUDARNO  |
| 2. NIM / KTP         | : 11720714807  |
| 3. Program Studi     | : ILMU HUKUM   |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP JAJANAN PANGAN DI LUAR GEDUNG OLEH DINAS KESEHATAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 942/MENKES/SK/VI/2003 TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN HYGIENE SANITASI MAKANAN JAJANAN DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS KESEHATAN KOTA TEMBILAHAN  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 21 Juni 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau





# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

## DINAS KESEHATAN

JALAN M. BOYA NO. 67 TELP. ( 0768 ) 21255 FAX – 22015

TEMBILAHAN – RIAU Kode Pos 29212

E-mail: [dinkes.kabinhil@gmail.com](mailto:dinkes.kabinhil@gmail.com) dan [uk\\_dinkesinhil@yahoo.com](mailto:uk_dinkesinhil@yahoo.com)

Tembilahan, 12 Juli 2021

Nomor : 071/SDK-PSDMK/2556  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian Data

Kepada Yth :  
Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan,  
Kesehatan Kerja dan Olahraga  
Kabupaten Indragiri Hilir

di -

### TEMBILAHAN

Menindak lanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/41918 Tanggal 21 Juni 2021 Perihal Izin Penelitian Data.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon kiranya Saudara untuk dapat memfasilitasi kegiatan dimaksud yang dilaksanakan oleh :

Nama : EKI SUDARNO  
NIM : 11720714807  
Program Studi : S1 ILMU HUKUM  
Judul Penelitian : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP JAJANAN PANGAN DI LUAR GEDUNG OLEH DINAS KESEHATAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 942/MENKES/SK/VII/2003 TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN HYGIENE SANITASI MAKANAN JAJANAN DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Demikian disampaikan atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

An. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
Sekretaris,



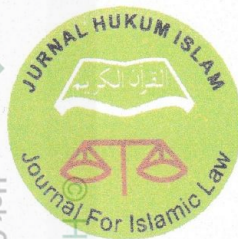
**RAHMI INDRASURI, SKM.M.KL**  
Pembina TK I/IV.b  
NIP. 19690109 198809 2 001

Hak Cipta Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : EKI SUDARNO  
**NIM** : 11720714807  
**JURUSAN** : ILMU HUKUM  
**JUDUL** : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENGENAI HYGIENE SANITASI TERHADAP PELAKU USAHA JAJANAN PANGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 942/MENKES/SK/VII/2003 TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN HYGIENE SANITASI MAKANAN JAJANAN DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

**PEMBIMBING: DR. MUHAMMAD DARWIS, S.HI, MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 11 Oktober 2021

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
**NIP. 19880430 201903 1 010**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**EKI SUDARNO**, lahir di Tembilahan pada tanggal 23 November 1999. Anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan ayahanda Sudarto dan ibunda Enidawasi, S.Pd. SD, Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 011 Pekan Arba, lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTsN 094 Tembilahan, dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 01 Tembilahan, dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara. Pada Tahun 2019 penulis melakukan magang di Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A, setelah itu melakukan Kuliah Kerja Nyata (KuKerTa) di Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Pada tanggal 20 September 2021 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi **“PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP JAJANAN PANGAN DI LUAR GEDUNG OLEH DINAS KESEHATAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 942/MENKES/SK/VII/2003 TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN HYGIENE SANITASI MAKANAN JAJANAN DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**.